

**Disribusi Layanan Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Berdasarkan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Magetan**

*Oleh: Muklis Khoirudin*

*(Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kawedanan, Magetan)*

**Abstrak:**

*Pola pemukiman (settlement patterns) yaitu proses bagaimana orang bermukim atau bertempat tinggal dan pola persebaran permukiman (distribution patterns of settlement) yakni, hasil dari proses orang menempati suatu wilayah. Pola persebaran yang dilakukan seragam, acak (random), mengelompok (clustered) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. Dengan cara demikian maka perbandingan antara pola persebaran bisa dilakukan dengan baik, bukan saja dari segi waktu tetapi juga bisa dari segi ruang (space). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data dengan menggunakan rumus USLE dan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis data diperoleh: (1) Hasil perhitungan dengan indek tetangga terdekat terdapat di Kecamatan Karangrejo, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Poncol dan Sukomoro. Untuk Kecamatan Karangrejo mempunyai pola persebaran pemukiman cenderung seragam sedangkan di Kecamatan Poncol dan Sukomoro mempunyai pola persebaran pemukiman yang cenderung random,. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa pola penyebaran pemukiman yang berada di Kabupaten Magetan sebagian besar random, dari 18 Kecamatan 16 di antaranya mempunyai pola random, sedang dua sisanya mempunyai pola seragam. (2) Pola penyebaran Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Magetan adalah mengelompok. Sedangkan Berdasarkan hasil tumpang susun antara peta distribusi tingkat layanan Sekolah Menengah Pertama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu topografi, aksesibilitas, kepadatan penduduk, jumlah fasilitas tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi dapat disimpulkan bahwa faktor topografi paling berpengaruh dalam menentukan distribusi pelayanan Sekolah Menengah Pertama di daerah penelitian.*

**Kata Kunci:** *Distribusi, Layanan Sekolah, Pola persebaran*

**PENDAHULUAN**

Jawa Timur merupakan provinsi di bagian timur Pulau Jawa Indonesia, dengan luas wilayah 47.922 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa

(2005). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Perkembangan dan layanan pendidikan di Jawa Timur sangat maju. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah perguruan tinggi negeri terbanyak di Indonesia. Tahun 2009 Propinsi Jawa Timur memiliki 259 Sekolah Menengah Umum dan 3580 Sekolah Menengah Pertama (Jawa Timur dalam angka 2009).

Kabupaten Magetan yang terdiri atas 18 Kecamatan merupakan salah satu kabupatèn di propinsi di Jawa Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan yang dimaksud salah satunya ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, jumlah penduduk, serta sektor-sektor lainnya (Magetan dalam angka, 2009). Meningkatnya jumlah penduduk akibat aktivitas ekonomi yang terus berkembang mendorong bertambahnya daerah permukiman atau terbentuk suatu daerah permukiman ataupun pola permukiman baru. Permukiman dapat diartikan suatu bentukan artificial maupun natural dengan segala kelengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya<sup>1</sup>, sedangkan pola permukiman merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan dengan akibat faktor-faktor fisik, kultural serta ekonomi.

Pengertian pola permukiman (*settlement patterns*) sering dirancukan dengan pengertian pola persebaran permukiman (*distribution patterns of settlement*). Pada

---

<sup>1</sup> Su Ritohardoyo, *Beberapa Dasar Klasifikasi dan Pola Persebaran Permukiman*, (Yogyakarta, Fakultas Geografi UGM, 1989), hlm 9

dasarnya pengertian-pengertian tersebut sangat berbeda. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pola permukiman, membahas pola permukiman perlu memperhatikan tinjauan individual permukiman atau kelompok permukiman.

- Tinjauan pola permukiman dari aspek individual, lebih mengarah ke bahasan-bahasan bentuk-bentuk permukiman secara individual sehingga dapat dibedakan pola permukiman memanjang, melingkar, sejajar, bujur sangkar dan kubus.
- Tinjauan pola permukiman dari aspek kelompok, lebih mengarah ke bahasan sifat persebaran dari individu-individu permukiman dalam satu kelompok. Oleh karenanya dari sifat persebarannya tersebut dapat dibedakan menjadi pola permukiman menyebar dan mengelompok.

2. Pola persebaran permukiman membahas sifat persebaran kelompok permukiman sebagai unit permukiman, yang juga dapat dibedakan menjadi dua:

- Tinjauan pola persebaran permukiman dari aspek bentuk persebaran kelompok permukiman, sehingga dapat dibedakan pola persebaran permukiman memanjang, melingkar, sejajar, bujur sangkar dan kubus.
- Tinjauan pola persebaran permukiman dari aspek sifat persebaran dari kelompok-kelompok permukiman, sehingga sifat perbedaannya tersebut dapat dibedakan menjadi pola persebaran permukiman menyebar dan mengelompok.

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magetan 2004-2015 disebutkan bahwa pengembangan fasilitas pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan

Menurut Standard Nasional Indonesia/SNI , dasar penyediaan fasilitas pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang formal (kelurahan dan kecamatan) maupun yang informal (RT dan RW) dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh fasilitas tersebut. Dasar penyediaan suatu fasilitas pendidikan juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada serta jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Persebaran layanan pendidikan di kabupaten Magetan tidak merata menjadi permasalahan sendiri hal ini terindikasi karena distribusi layanan sekolah tidak memperhatikan karakteristik persebaran permukiman. Persoalan kekurangan siswa pada sekolah tingkat pertama pada daerah tertentu serta banyaknya sekolah yang melayani siswa dari luar wilayah normatifnya terindikasi karena distribusi layanan fasilitas pendidikan sekolah yang ada belum sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah kabupaten Magetan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu arahan konsep

distribusi layanan sekolah didasarkan pada keadaan demografi serta memperhatikan kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Magetan.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami pola persebaran permukiman di daerah penelitian.
2. Untuk mengetahui dan memahami pola persebaran sekolah di daerah penelitian.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi layanan sekolah di Kabupaten Magetan.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Manfaat praktis

Sebagai pedoman dalam menentukan lokasi sekolah tingkat pertama di Kabupaten Magetan serta adanya konsep pengembangan sarana-prasarana pendidikan dasar yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

2. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan konsep teoritik dan pengembangan IPTEK dalam pembangunan wilayah melalui distribusi infrastruktur sosial berdasarkan kebutuhan wilayah serta karakteristik persebaran permukimannya,

khususnya infrastruktur pendidikan dasar.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Geografi dalam studinya menggunakan tiga pendekatan, yaitu keruangan, ekologi dan kompleks wilayah. Dalam pendekatan ini, perpaduan elemen geografi merupakan ciri khas sehingga disebut sebagai geografi terpadu<sup>2</sup>. Menurut Bintarto ada tiga hal dalam mempelajari obyek formal geografi, yaitu : (1) pola dan sebaran gejala tertentu di muka bumi, (2) keterkaitan atau hubungan antar gejala dan (3) perubahan atau perkembangan dari gejala yang ada.

Permukiman adalah kelompok manusia berdasarkan satuan tempat tinggal atau kediaman, mencakup fasilitas-fasilitasnya seperti bangunan rumah serta jalur jalan yang melayani manusia tersebut. Menurut D. Van der zee, di dalam buku Surito mengatakan, “ *The world settlement*” means : 1. The process where by people become sedentary within an areans ; 2. the result of this proces”<sup>3</sup>.

Menurut definisi tersebut, arti kata *settlement* berarti :

1. Proses dengan cara apa orang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah,
2. Hasil atau akibat dari proses tersebut.

Dalam batasan ini terlihat adanya dua arti *settlement* yang berbeda namun saling berkaitan, dimana arti yang pertama mengacu kepemukiman yakni proses bagaimana orang bermukim atau bertempat tinggal, sedang yang kedua mengacu

---

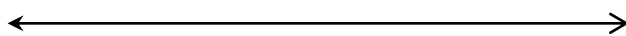
<sup>2</sup> Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, *Metode Analisa Geografi*,(Jakarta,LP3S,1979),hlm 12

<sup>3</sup> Su Ritohardoyo, *Beberapa Dasar Klasifikasi dan Pola Persebaran Permukiman*,(Yogyakarta,Fakultas Geografi UGM,1989), hlm 6-7

kepermukiman yakni tempat tinggal yang merupakan hasil dari proses orang menempati suatu wilayah.

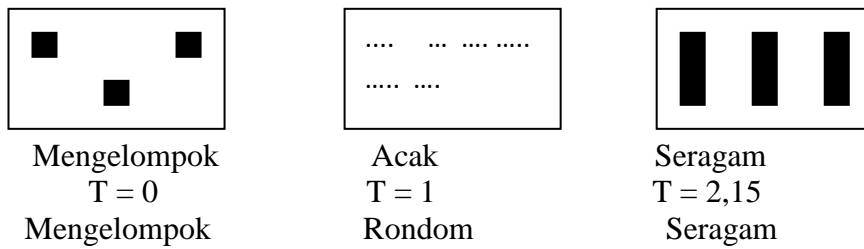
Bintarto dan Surastopo Hadisumarno mengatakan bahwa pola permukiman dan agihan permukiman memiliki hubungan yang sangat erat<sup>4</sup>. Agihan permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman, dan dimana tidak terdapat dalam suatu wilayah, atau dengan pernyataan lain agihan permukiman membicarakan tentang lokasi permukiman. Pola permukiman membicarakan sifat agihan permukiman, atau susunan agihan permukiman. Pola permukiman ini sangat berbeda dengan pengertian pola permukiman yang bertipe atau corak cara pemindahan penduduk dari suatu tempat daerah ke daerah lain, yang mencakup proses kegiatan penempatan penduduk atau pemindahan penduduk dari permukiman asal ke permukiman baru.

Pola persebaran yang dilakukan seragam (*uniform*), acak (*random*), mengelompok (*clustered*) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. Dengan cara demikian maka perbandingan antara pola persebaran dapat dilakukan dengan baik, bukan saja dari segi waktu tetapi juga dapat segi ruang (*space*). Pendekatan ini disebut analisis tetangga terdekat.



---

<sup>4</sup> Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, *Metode Analisa Geografi*. (Jakarta, LP3S, 1979) hlm 75



Gambar 1. Jenis Pola Persebaran

Dalam menggunakan analisis tetangga terdekat harus diperhatikan beberapa langkah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a) Menentukan batas wilayah yang akan diselidiki
- b) Ubah pola persebaran obyek menjadi pola persebaran titik
- c) Berikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah analisis
- d) Ukur jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik dengan titik lain yang merupakan tetangga terdekatnya dan catat ukuran jarak ini
- e) Hitung besar parameter tetangga terdekat atau T dengan formula :

$$T = \frac{ju}{Jh}$$

Keterangan :

T = Indeks penyebaran tetangga terdekat

ju = Jarak rata – rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

jh = Jarak rata – rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola random

---

<sup>5</sup> Bintarto,R. 1977. *Buku Penuntun Geografi Sosial*,(Yogyakarta,U.P Sprin,1977),75

$$= \frac{1}{\sqrt[2]{p}}$$

P = Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah titik (N)  
dibagi luas wilayah (A)

Dari beberapa uraian keterkaitan antara fasilitas umum dengan permukiman penduduk serta memperhatikan penduduk serta memperhatikan kriteria yang berlaku sebagai dasar perencanaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Daerah permukiman sebagai bagian dari sistem penataan lingkungan hidup manusia di dalamnya mencakup penyediaan fasilitas umum berupa sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- b. Analisis kebutuhan penyediaan fasilitas umum berdasarkan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk pada setiap kawasan, karakteristik wilayah permukiman serta pola persebarannya, distribusi dan jangkauan pelayanan fasilitas umum.
- c. Pola distribusi dan penentuan lokasi fasilitas umum harus memenuhi kriteria lokasi fasilitas umum pada pusat-pusat permukiman penduduk, mudah diakses dan sesuai dengan peruntukan lahan (tata guna lahan).
- d. Diperlukan ukuran operasional khusus untuk melayani kebutuhan minimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan stratified proposional sampling yang di dasarkan pada tingkat/ kelas jumlah siswa yang ada di tiap-tiap sekolah Menengah Pertama. Pemilihan metode dan pendekatan tersebut karena penelitian ini bersifat generalisasi yakni mencoba menganalisa fakta-fakta (realitas) dan data-data empiris untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi/ menyebabkan terjadinya sesuatu hal. Pengambilan sampel data status sekolahan untuk keperluan penelitian ini hanya yang SMP Negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pola persebaran permukiman

Berdasarkan hasil perhitungan dengan indeks tetangga terdekat diperoleh indeks agihan tetangga terdekat (T) tertinggi terdapat di Kecamatan Karangrejo, yaitu 2,00 sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Poncol dan Sukomoro, yaitu 0,88. Menurut rangkaian kesatuan nilai (*continuum*) parameter tetangga terdekat T, untuk Kecamatan Karangrejo mempunyai pola persebaran permukiman cenderung seragam di mana nilai indeks  $T = 2,00$  karena nilai  $T = 2,00$  mendekati nilai 2,15, sedangkan di Kecamatan Poncol dan Sukomoro mempunyai pola persebaran permukiman yang cenderung rondom (tabel 1).

**Tabel 1. Pola Permukiman di Kabupaten Magetan.**

No	Kecamatan	j=Jarak rata-rata dalam peta (cm)	N	Luas (Km <sup>2</sup> )	$N$ p = ----- Luas	$\sqrt{p}$	$2\sqrt{p}$	$\frac{1}{J_h} = \frac{1}{\frac{2\sqrt{p}}{N}}$	$\frac{j \times \text{Skala (km)}}{J_u} = \frac{j \times \text{Skala (km)}}{N}$	$T = \frac{J_u}{J_h}$	Pola
1.	Poncol	11	48	51,31	0,94	0,97	1,94	0,52	0,46	0,88	Rondom
2..	Parang	20	80	71,64	1,12	1,06	2,12	0,47	0,50	1,06	Rondom
3.	Lembeyan	15	76	54,85	1,39	1,18	2,36	0,42	0,39	0,94	Rondom
4.	Takeran	4,9	10	25,47	0,39	0,62	1,24	0,81	0,98	1,21	Rondom
5.	Nguntoronadi	5	14	16,71	0,84	0,93	1,86	0,54	0,71	1,32	Rondom
6.	Kawedanan	10	24	39,45	0,61	0,78	1,56	0,64	0,83	1,30	Rondom
7.	Magetan	6	13	21,41	0,61	0,78	1,56	0,64	0,92	1,44	Rondom
8.	Ngariboyo	12,5	42	39,13	1,07	1,03	2,06	0,44	0,56	1,35	Rondom
9.	Plaosan	16	50	66,09	0,76	0,87	1,74	0,58	0,64	1,10	Rondom
10	Sidorejo	9	35	39,16	0,89	0,94	1,88	0,53	0,51	0,97	Rondom



**Gambar 2. Pola Persebaran Permukiman Daerah Penelitian**

2. Pola persebaran Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan dengan indek tetangga terdekat diketahui bahwa pola persebaran Sekolah Menengah Pertama di daerah penelitian adalah mengelompok, karena semua nilai tetangga terdekat (T) kurang dari 1 seperti dapat dilihat pada tabel 2. Adapun untuk lebih jelasnya pola persebaran Sekolah Menengah Pertama di daerah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.

No	Kecamatan	j=Jarak rata-rata dalam peta (cm)	N	Luas (Km <sup>2</sup> )	$P = \frac{N}{Luas}$	$\sqrt{p}$	$2\sqrt{p}$	$\frac{1}{2\sqrt{p}}$	$j \times \text{Skala (km)}$ Ju= $\frac{j \times \text{Skala}}{N}$	T = $\frac{Ju}{Jh}$	Pola
1.	Poncol	2,5	3	51,31	0,06	0,24	0,49	2,04	0,2	0,10	Mengelompok
2..	Parang	4,2	3	71,64	0,04	0,2	0,40	2,50	0,33	0,13	Mengelompok
3.	Lembeyan	1,3	2	54,85	0,04	0,2	0,40	2,50	0,04	0,02	Mengelompok
4.	Takeran	-	1	25,47	0,04	0,2	0,40	2,50	0,00	0,00	Mengelompok
5.	Nguntoronadi	-	1	16,71	0,06	0,24	0,48	2,08	0,00	0,00	Mengelompok
6.	Kawedanan	1,8	3	39,45	0,08	0,28	0,57	1,75	0,14	0,10	Mengelompok
7.	Magetan	3,6	4	21,41	0,19	0,44	0,88	1,14	0,21	0,18	Mengelompok
8.	Ngariboyo	1,2	2	39,13	0,05	0,22	0,44	2,27	0,14	0,06	Mengelompok
9.	Plaosan	2	3	66,09	0,05	0,22	0,44	2,27	0,16	0,07	Mengelompok
10.	Sidorejo	0,7	2	39,16	0,05	0,22	0,44	2,27	0,09	0,04	Mengelompok
11.	Panekan	1,1	2	64,23	0,03	0,17	0,34	2,94	0,30	0,10	Mengelompok
12.	Sukomoro	2	2	33,06	0,06	0,24	0,48	2,08	0,24	0,12	Mengelompok
13.	Bendo	2,5	2	42,90	0,05	0,22	0,44	2,27	0,30	0,13	Mengelompok
14.	Maospati	2,7	3	25,26	0,12	0,35	0,70	1,43	0,21	0,15	Mengelompok
15.	Karangrejo	1,2	2	15,15	0,13	0,36	0,72	1,39	0,14	0,10	Mengelompok
16.	Karas	-	1	35,29	0,03	0,17	0,34	2,94	0,00	0,00	Mengelompok
17.	Barat	1,5	2	22,71	0,09	0,3	0,60	1,67	0,18	0,11	Mengelompok
18.	Kartoharjo	-	1	25,03	0,04	0,2	0,40	2,50	0,00	0,00	Mengelompok

Sumber : hasil perhitungan

**Gambar 3. Peta Pola Persebaran Sekolah Menengah Pertama Daerah Penelitian**



### 3. Faktor-faktor geografi yang berpengaruh terhadap distribusi pelayanan Sekolah Menengah Pertama

#### a. Topografi

Topografi daerah penelitian adalah datar hingga bergunung dengan kemiringan lereng sebagai berikut:

- Kemiringan 0 – 2 % merupakan wilayah datar dengan luas 37.732,01 ha atau 54,77 % dari luas wilayah Kabupaten;
- Kemiringan 2 – 15 % merupakan wilayah landai dengan luas 10.199,40 ha atau 14,81 % dari luas wilayah Kabupaten;
- Kemiringan 15 – 40 % merupakan wilayah bergelombang hingga berbukit dengan luas 8.442,58 ha atau 12,26 % dari luas wilayah Kabupaten;
- Kemiringan 40 % merupakan wilayah bergunung dengan luas wilayah 12.509,47 ha atau 18,16 % dari luas wilayah Kabupaten.

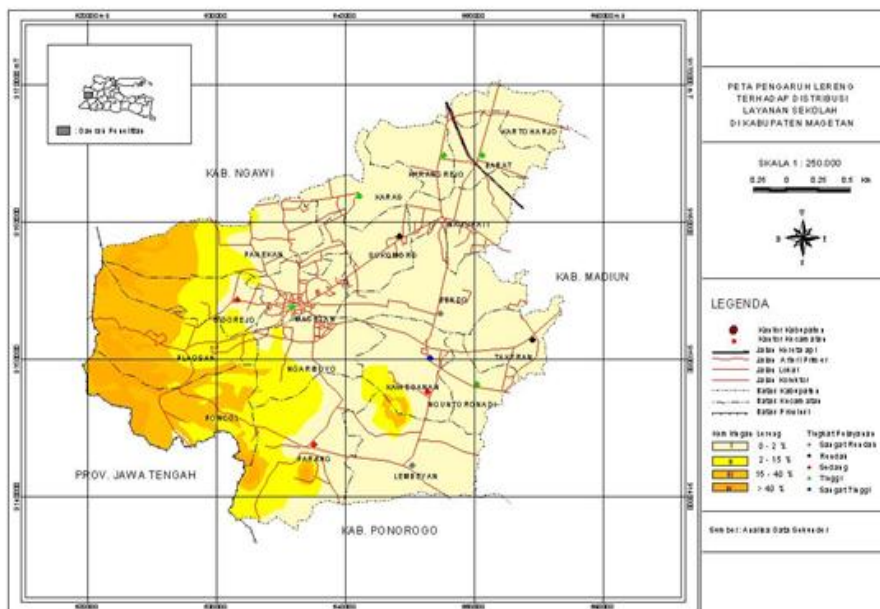
Kemiringan lereng merupakan faktor fisik yang sedikit banyak mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan dalam menentukan lokasi sebuah bangunan maupun untuk aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil tumpang susun (*overlay*) antara peta distribusi tingkat pelayanan sekolah dengan peta

kemiringan lereng dapat diketahui bahwa semua tingkat pelayanan sekolah dari yang kelas sangat rendah hingga sangat tinggi tersebar di daerah dengan kemiringan lereng 0 – 2 % atau bertopografi datar.

Hal ini wajar karena daerah yang datar mudah dijangkau baik dengan jalan kaki maupun dengan alat transportasi, sebaliknya kemiringan lereng yang tinggi merupakan suatu kendala atau hambatan dalam menempuh perjalanan melakukan aktivitas sehari-hari terutama bagi penduduk yang hanya berjalan dan bersepeda.

Distribusi dari Sekolah Menengah Tingkat Pertama berada pada kemiringan lereng yang rendah ini diharapkan dapat memberikan layanan yang baik untuk masyarakat yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor topografi mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan distribusi pelayanan Sekolah Menengah Pertama.



**Gambar 4. Peta Pengaruh Topografi (lereng) Terhadap Distribusi Layanan Sekolah di Daerah Penelitian**

**b. Aksesibilitas**

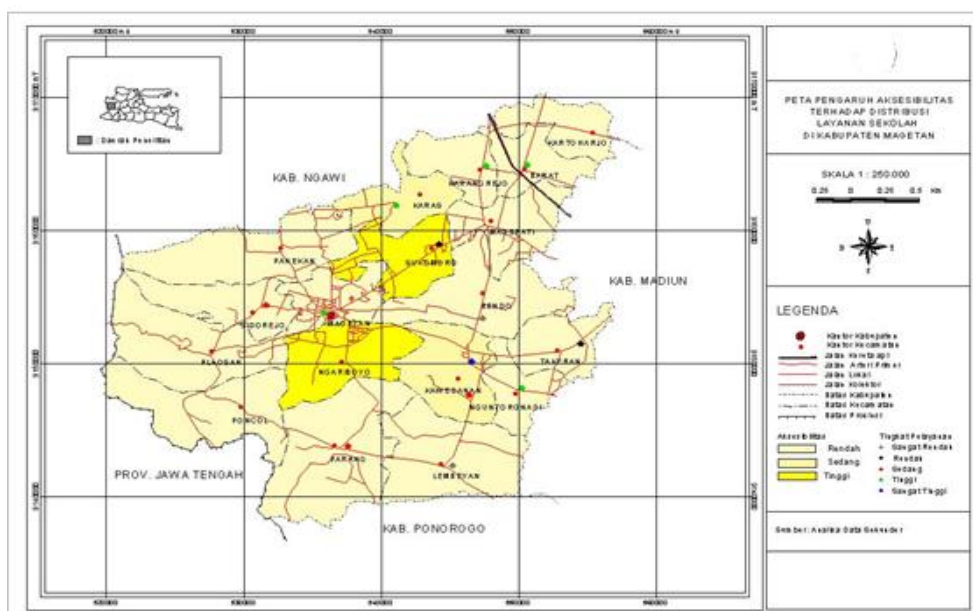
Aksesibilitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan kemudahan dalam menjangkau tempat tertentu dari tempat tertentu pula serta keadaan yang strategis dari suatu wilayah atau daerah. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa aksesibilitas daerah penelitian sebagian besar adalah rendah. Dari 18 kecamatan 14 di antaranya mempunyai aksesibilitas rendah, 2 kecamatan mempunyai aksesibilitas sedang dan 2 mempunyai aksesibilitas tinggi.

Hasil tumpang susun antara peta aksesibilitas dengan peta distribusi tingkat pelayanan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Magetan diketahui, yaitu:

1. Tingkat pelayanan sangat rendah tersebar di daerah yang juga mempunyai aksesibilitas rendah, yaitu SMP N 2 Lambeyan dan SMP N 2 Bendo.
2. Tingkat pelayanan rendah tersebar di daerah yang juga mempunyai aksesibilitas rendah, yaitu SMP N 1 Takeran dan SMP N 2 Sukomoro.
3. Tingkat pelayanan sedang tersebar di daerah yang mempunyai aksesibilitas rendah dan sedang. Sekolah yang mempunyai tingkat pelayanan sedang tersebar di daerah yang beraksesibilitas rendah adalah SMP N 1 Sidorejo, dan SMP N 2 Parang, sedangkan yang tersebar berada di daerah beraksesibilitas sedang adalah SMP N 2 Kawedanan.

4. Tingkat pelayanan tinggi tersebar di daerah yang mempunyai aksesibilitas rendah adalah SMP N 2 Magetan, SMP N 1 Nguntoronadi, SMP N 2 Karangrejo, dan SMP N 1 Barat, sedangkan Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai tingkat aksesibilitas tinggi yang tersebar di daerah yang mempunyai aksesibilitas sedang adalah SMP N 1 Karas.
5. Tingkat pelayanan sangat tinggi yang berada di daerah yang mempunyai aksesibilitas sedang adalah SMP N 1 Kawedanan.

Jika dilihat dari hasil tumpangsusun tersebut aksesibilitas tidak mempengaruhi tingkat pelayanan Sekolah Menengah Pertama, karena tingkat pelayanan sangat tinggi dan tinggi tidak tersebar di daerah yang mempunyai aksesibilitas tinggi tetapi justru banyak tersebar di daerah yang mempunyai aksesibilitas rendah hingga sedang.



### **Gambar 5. Peta Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Distribusi Layanan Sekolah di Daerah Penelitian**

#### **c. Kepadatan Penduduk**

Keberadaan suatu pedusunan di suatu wilayah desa atau pun kota disebabkan oleh adanya kemungkinan untuk hidup bagi sekelompok penduduk yang bersangkutan, sesuai dengan keahlian atau ketrampilan mereka. Besarnya kemungkinan penduduk untuk hidup penduduk yang tersedia disuatu tempat diikuti pula oleh besarnya jumlah penduduk suatu yang menempati suatu tempat tersebut. Oleh karena itu diasumsikan, besarnya jumlah penduduk penghuni suatu wilayah berkaitan erat dengan semakin mengelompoknya agihan penduduk yang terjadi.

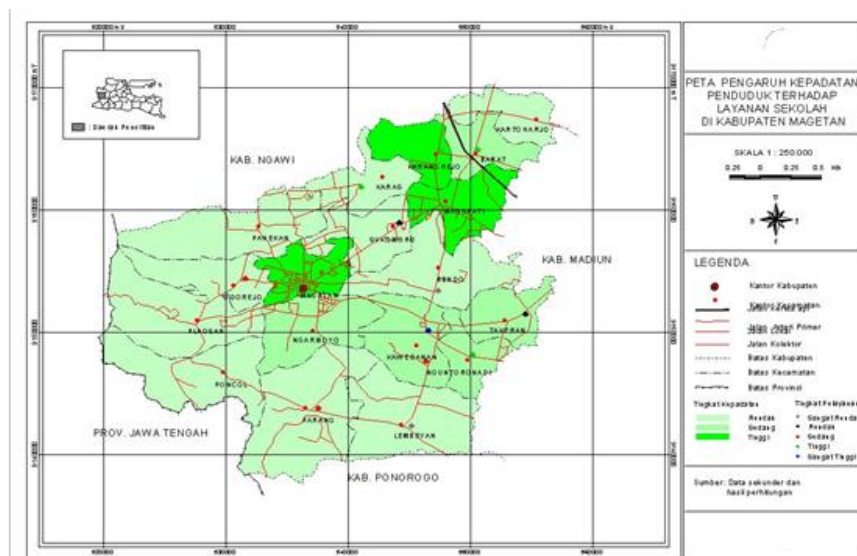
Jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas lahan yang ditempati jumlah penduduk yang selalu bertambah akan berakibat semakin padatnya jumlah penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan disatu pihak luas daerah relatif tetap memungkinkan terjadinya pengelompokan penduduk pada suatu wilayah semakin padat. Oleh karena diasumsikan bahwa semakin besar kepadatan penduduk suatu wilayah maka akan semakin tinggi tingkat pengelompokan pola persebaran permukiman. Demikian juga jika dikaitkan dengan tingkat pelayanan sekolah, semakin padat penduduknya maka akan semakin tinggi tingkat pelayanan sekolahnya.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar kepadatan penduduk di Kabupaten Magetan adalah rendah. Dari 18 kecamatan 10 di

antaranya mempunyai kepadatan rendah rendah, 5 kecamatan mempunyai kepadatan sedang dan 3 mempunyai kepadatan tinggi.

Hasil tumpang susun (*overlay*) antara peta kepadatan penduduk dengan peta tingkat pelayanan Sekolah Menengah Pertama diketahui bahwa dari 5 sekolah yang mempunyai tingkat pelayanan tinggi hanya ada 2 sekolah yang berada di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu, SMP N 2 Karangrejo dan SMP N 2 Magetan, 2 sekolah berada di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk sedang, yaitu SMP N 1 Barat dan SMP N 1 Nguntoronadi serta 1 sekolah justru berada di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk rendah, yaitu SMP N 1 Karas. Sekolah yang mempunyai tingkat pelayanan sangat tinggi justru berada di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk sedang, yaitu SMP N 1 Kawedanan. Sekolah-sekolahan yang mempunyai tingkat pelayanan sangat rendah-rendah dan sedang tersebar di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

Berdasarkan hasil tumpang susun tersebut dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk tidak mempengaruhi tingkat pelayanan Sekolah Menengah Pertama di daerah penelitian.



**Gambar 6. Peta Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Distribusi Layanan Sekolah di Daerah Penelitian**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dengan indek tetangga terdekat diperoleh indeks agihan tetangga terdekat (T) tertinggi terdapat di Kecamatan Karangrejo, yaitu 2,00 sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Poncol dan Sukomoro, yaitu 0,88. Menurut rangkaian kesatuan nilai (*continuum*) parameter tetangga terdekat T, untuk Kecamatan Karangrejo mempunyai pola persebaran permukiman cenderung seragam di mana nilai indeks  $T = 2,00$  karena nilai  $T = 2,00$  mendekati nilai 2,15, sedangkan di Kecamatan Poncol dan Sukomoro mempunyai pola persebaran permukiman yang cenderung rondom, karena nilai  $T = 0,88$  masih mendekati 1. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa pola penyebaran permukiman yang berada di Kabupaten Magetan sebagianbesar rondom, dari 18 Kecamatan 16 di antaranya mempunyai pola rondom, sedang dua sisanya mempunyai pola seragam
2. Berdasarkan hasil perhitungan juga dapat diketahui bahwa pola penyebaran Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Magetan adalah mengelompok, karena semua nilai tetangga terdekat (T) kurang dari 1.
3. Berdasarkan hasil tumpang susun antara peta distribusi tingkat layanan Sekolah Menengah Pertama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu topografi,

aksesibilitas, kepadatan penduduk dapat disimpulkan bahwa faktor topografi paling berpengaruh dalam menentukan distribusi pelayanan Sekolah Menengah Pertama di daerah penelitian.

#### **b. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat diberikan :

1. Penempatan sarana dan prasana sosial maupun ekonomi masih sering tidak sesuai dengan konsentrasi persebaran penduduk di setiap permukiman, maka dalam jangka pendek terkonsentrasinya sarana dan prasarana sosial ekonomi pada tempat-tempat tertentu harus ditinjau kembali, sehingga jangka menengahnya agar terjadi keseimbangan antara sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang tersedia dengan penduduk yang semakin padat.
2. Perlu di lakukan penelitian lanjutan mengenai kebijakan *regrouping* sekolah menengah pada wilayah dengan kondisi ketersediaan fasilitas pendidikan lebih besar daripada kebutuhannya dengan tetap memperhatikan bahwa sekolah menengah pertama merupakan fasilitas sosial yang menjadi suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Magetan Dalam Angka Tahun 2009*. Magetan. BPS
- \_\_\_\_\_. 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2020*. Magetan. Bappeda
- Bintarto, R. 1977. *Buku Penuntun Geografi Sosial*. Yogyakarta: U.P Spring.
- \_\_\_\_\_. 1977. *Suatu Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta: U.P Spring.
- Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3S.
- Daljoeni N. 1982. *Pengantar Geografi*. Bandung: Iluni.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Geografi Baru Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni
- Djemabut Blaang, 1977. *Perumahan Dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dahroni. 1997. *Geografi Permukiman. Diktat Kuliah*. Surakarta: Fakultas Geografi UMS.
- Hasan Shadily. 1980. *Kamus Istilah*. Jakarta: Gramedia.
- Peter Hagget. 1970. *Geography: A Modern Syntesis*. New York: Harper and Row Publisher

- Ida Bagus Mantra. 1983. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahya.
- Nursid Sumaatmadja. 1982. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Tarsito.
- Ahmad Nur Sonhaji. 2009. Konsep Distribusi Layanan Sekolah Dasar (SD/ MI Berdasarkan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Gresik. *Tesis*. Surabaya: ITS.
- Su Ritohardoyo. 1989. *Beberapa Dasar Klasifikasi dan Pola Persebaran Permukiman*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Teguh Slamet. 2009. Pola Permukiman. Diambil dari [http://slametteguh.blogspot.com / 2009/02/ pola-permukiman.html](http://slametteguh.blogspot.com/2009/02/pola-permukiman.html)
- Tarigan. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.